

Dampak Pencabutan Subsidi Pupuk Dan Antisipasi Polri

Oleh : Brigjenpol. Drs. Heru Susanto (Sahli Kapolri Bidang Sosek)

PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah merupakan sasaran prioritas dalam setiap rencana pembangunan lima tahunan yang dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia yang tentunya untuk keberhasilannya harus ditunjang pula oleh keberhasilan di sektor-sektor lain.

Menyadari betapa pentingnya keberhasilan dalam pembangunan di bidang sektor pertanian ini, maka untuk pencapaiannya pemerintah dengan melalui kebijakan-kebijakannya telah memberikan berbagai fasilitas subsidi pengadaan pupuk kepada para petani, dengan harapan dapat meningkatkan swasembada

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



pangan sehingga dapat dihemat cadangan devisa yang ada karena import pangan dapat ditekan.

Namun pada bulan Desember 1998, pemerintah telah mencabut subsidi pupuk yang selanjutnya harga pupuk akan disesuaikan dengan mekanisme pasar, sebagai dampak dari pencabutan subsidi pupuk tersebut ternyata telah menimbulkan keresahan di kalangan para petani bahkan telah di ekspresikan dengan tindakan-tindakan yang bersifat destruktif bahkan telah melanggar peraturan seperti penjarahan, pengrusakan dan lain-lain.

Tindakan-tindakan diatas tentunya harus segera diatasi dan diantisipasi oleh Polri, karena apabila dibiarkan terus berkembang akan mengganggu stabilitas Nasional yang pada gilirannya juga mempengaruhi keberhasilan Pembangunan Nasional itu sendiri.

FAKTA-FAKTA

1. Untuk tercapainya swasembada pangan, khususnya peningkatan produksi beras pemerintah telah memberikan subsidi pupuk kepada para petani sebesar 2,1 Triliyun Rupiah pertahun serta pengucuran KUT (Kredit Usaha Tani) sebagai modal produksi.
2. Sebagai realisasi pengaturan pemberian subsidi pupuk pemerintahpun telah mem-

tanam, pemerintah telah memesan pupuk dari PT. Pusri dan PT. Petro Kimia Gresik, bahkan telah diproduksi melebihi target yaitu 110%, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang sebaliknya yaitu pupuk langka di pasaran.

4. Pemerintah secara mendadak telah mengeluarkan kebijaksanaan yaitu mencabut subsidi pupuk yang diperlakukan TMT 1 Desember 1998 dimana pada bulan-bulan itu adalah merupakan musim tanam bagi petani padi.
5. Dampak dari pencabutan subsidi, telah menimbulkan berbagai polemik di media massa serta menimbulkan keresahan petani, karena pupuk hilang dari pasaran, bahkan telah terjadi tindakan penjarahan terhadap gudang-gudang, toko-toko pupuk, angkutan pupuk yang mengganggu stabilitas keamanan.

ANALISIS/KAJIAN

6. Pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Desember 1998, semata-mata didasarkan atas hasil evaluasi bahwa pemberian subsidi pupuk yang selama ini diberikan kepada para petani sebesar 2,1 Triliyun Rupiah dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi, karena fakta me-

subsidy kepada para petani, maka rasanya kurang tepat kalau subsidi yang selama ini diberikan justru dicabut, tetapi solusinya adalah mencari jawaban mengapa subsidi tidak sampai kepada petani, dimana kebocorannya dan siapa pelakunya, itu yang harus ditangani, jadi bukan menghentikan subsidi pupuk yang sebenarnya tidak terlalu besar yaitu hanya 2,1 Trilyun jika dibandingkan dengan subsidi penyelesaian perbankan sebesar 257 Trilyun.

8. Sahkan pencabutan subsidi pupuk jika diamati dari aspek ekonomi justru merugikan pemerintah karena :

a. Program swasembada pangan tidak tercapai, akibatnya pemerintah harus mengimport beras dari luar negeri yang harganya ditentukan dengan kurs dollar, padahal situasi Rupiah saat ini masih pada posisi lemah, sehingga membutuhkan dana yang besar untuk mencukupi stock pangan nasional.

b. Demikian halnya dengan rencana pemerintah untuk membuka L/C (Letter Of Credit), yang pada dasarnya memberi fasilitas kepada para importir untuk mendatangkan pupuk dari luar negeri, sehingga kelangkaan pupuk di pasaran dapat diatasi, inipun secara ekonomis juga tidak memecahkan masalah secara mendasar



Dampak dari pencabutan subsidi, telah menimbulkan berbagai polemik di media massa serta menimbulkan keresahan petani, karena pupuk hilang dari pasaran, bahkan telah terjadi tindakan penjarahan terhadap gudang-gudang, toko-toko pupuk, angkutan pupuk yang mengganggu stabilitas keamanan.

telah menimbulkan keresahan di kalangan petani, hal ini disebabkan:

a. Petani telah cukup lama dan terbiasa menggunakan pupuk organik (kimia), sehingga untuk merubah kebiasaan ini tidak mudah dan memerlukan waktu untuk proses penyesuaiannya.

b. Para petani telah mampu memprediksi, bahwa dengan tanpa menggunakan pupuk organik, pada musim tanam hasil produksi yang diperoleh tidak optimal,

penjuru tanah air antara lain berupa :

a. Pupuk langka atau sulit diperoleh di pasaran.

b. Harga pupuk meningkat tajam, sebagai akibat tidak berimbang antara Supply and Demand.

c. Adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk demi keuntungan pribadi atau upaya penimbunan pupuk.

d. Terjadinya pemalsuan beberapa jenis pupuk di beberapa Propinsi (Sumut, Jateng, Jatim dan NTB).

e. Terjadinya kasus-kasus penjarahan di gudang-gudang, toko pengecer pupuk dan truck-truck pengangkut pupuk.

11. Kesemua kejadian seperti terurai diatas pada hakekatnya adalah merupakan dampak dari dihapusnya subsidi pupuk yang diputuskan oleh pemerintah secara tiba-tiba, padahal para petani saat itu sangat memerlukan pupuk, oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau situasi seperti itu menjadi pemicu terjadinya tindakan penjarahan, pengrusakan dan lain sebagainya di beberapa tempat, oleh karena agar kasus serupa tidak meluas di tempat-tempat lain, utamanya daerah yang menjadi sentra penghasil padi, perlu adanya tindakan antisipasi yang dilakukan oleh Polri.

yang telah diambil oleh pemerintah, disisi lain juga harus bertindak secara proaktif untuk mengeliminir dampak yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak meluas ke tempat lain.

13. Langkah-langkah proaktif yang dilaksanakan oleh Polri dalam mengantisipasi dampak pencabutan pupuk adalah :

a. Peningkatan kegiatan deteksi dini.

Dalam kegiatan ini Polri secara intensif, melaksanakan tindakan penyelidikan yang diarahkan kepada :

1) Mekanisme produksi sampai dengan jalur distribusi pupuk.

2) Daerah-daerah yang di prediksi akan terjadi benturan-benturan sebagai akibat kelangkaan pupuk.

Sehingga dengan langkah-langkah penyelidikan secara intensif dapat dirumuskan sasaran, anatomi sasaran, cara bertindak yang tepat yang harus dilaksanakan oleh fungsi lain di lapangan.

b. Peningkatan kegiatan preemtif.

1) Polri melalui Babinkamtibmas secara terus menerus melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan pemerintah tentang penghapusan subsidi pupuk kepada kelompok-kelompok tani di wilayah binaan

lain yaitu dengan mempergunakan pupuk anorganik.

c. Melaksanakan tindakan preventif.

Kegiatan yang bersifat pencegahan ini, dimaksudkan untuk memperkecil kesempatan/ peluang kelompok-kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan-tindakan destruktif yang dapat di diskripsikan dalam bentuk:

- 1) Peningkatan pengamanan jalur distribusi pupuk sampai ke tempat tujuan.
- 2) Melakukan kegiatan patroli yang diarahkan di lokasi-lokasi gudang pupuk, toko pengecer pupuk, maupun kendaraan pengangkut pupuk.
- 3) Mensiagakan kekuatan Dalmas yang cukup di daerah-daerah yang diperkirakan rawan terjadinya penjarahan.

d. Melaksanakan tindakan represif.

Tindakan represif yang dilaksanakan pada hakekatnya untuk memberikan efek detern terhadap pelaku, sehingga tidak diikuti dan meluas ke wilayah lain, adapun tindakan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melaksanakan Operasi Kepolisian yang diarahkan terhadap pelaku penyimpangan distribusi pupuk, penimbun pupuk dan pemalsu pupuk.
- 2) Melaksanakan penindakan secara te-

yang selama ini diberikan tidak sampai kepada petani dan kalau diberikan terus akan merugikan pemerintah.

- b. Dampak dari penghapusan subsidi pupuk, mengakibatkan harga pupuk meningkat dan langka di pasaran, sehingga menimbulkan keresahan petani, yang di ekspresikan dalam bentuk penjarahan.
- c. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya tindakan-tindakan penjarahan yang dilakukan petani, Polri melaksanakan langkah-langkah proaktif yang diawali dengan melakukan deteksi dini, preemtif, preventif dan represif, yang dilaksanakan secara simultan.

Langkah tindak yang disarankan

- a. Menyadari bahwa penanganan masalah pupuk melibatkan banyak instansi, kiranya Polri perlu memberikan saran kepada pemerintah agar :
 - 1) Pemberlakuan penghapusan subsidi pupuk, ditangguhkan sampai selesai musim tanam.
 - 2) Apabila penghapusan subsidi pupuk tetap diberlakukan kiranya pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani dalam bentuk :
 - a). Meningkatkan harga jual gabah.
 - b). Memberikan kemudahan dalam

